

**Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur**

**Achmad Haditheo<sup>1</sup>, Karnila Ali<sup>2</sup>**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Metro

Email : [haditheoz04@gmail.com](mailto:haditheoz04@gmail.com)<sup>1</sup>, [karnila.ali85@gmail.com](mailto:karnila.ali85@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara secara langsung segenap aktivitas atau kegiatan yang ada di BPKAD Kabupaten Lampung Timur. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data model Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan ini). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

**Kata Kunci:** Penyajian, Laporan Keuangan Daerah, Akrual

**Abstract**

*This study aimed to determine the accrual accounting presentation of regional financial statements for the East Lampung Regency Financial and Asset Management. Data is obtained from observations, documents and face-to-face interviews of all BPKAD activities or activities, East Lampung Regency. Research data analysis was performed using Miles and Huberman model data analysis, namely data reduction, data visualization and conclusion drawing/verification. The results show that the East Lampung Government has presented 7 (seven) main elements of financial statements, which are reports on budget performance, reports on changes in budget balance, balance sheets. accounting balance sheet, the statement of operations, the statement of cash flows, the statement of changes in equity, and the notes to the financial statements (which are not separate from these financial statements). The implementation of regional financial management in East Lampung Regency Government refers to the government accounting standards (SAP) based on accrual accounting.*

**Keywords:** Presentation, Regional Financial Statements, Accruals

**I. PENDAHULUAN**

Undang-undang (UU) Nomor 17 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP Berbasis Kas menuju Akrual ini

dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu, Selanjutnya setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrua, Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrua. Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 dijelaskan bahwa, pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Penerapan akuntansi berbasis akrua di pemerintah diatur dalam pasal 7 PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa: Penerapan SAP Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrua secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, dimana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan tersebut, selanjutnya disusun dengan menggunakan kodifikasi akun 1 sampai dengan 9 sesuai Badan Akun Standar (BAS). PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian laporan keuangan tujuannya yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrua. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrua baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan entitas.

Dari penjelasan diatas penulis mengangkat penelitian di kantor badan pemerintah keuangan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, untuk mengetahui bagaimanakah “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua”. yang diterapkan atas laporan keuangan daerah itu bisa mamenuhi SAP yang sudah ditentukan. Sehingga penerapan akuntansi berbasis akrua pemerintah bisa mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, agar dapat lebih terukur kinerjanya. Sebagaimana tujuan laporan keuangan disajikan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi calon investor dan krediturnya. (Febriyanto: 2021) Hal tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya (*good and clean corporate governance*) sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran seluruh rakyat dapat dicapai, Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dan seluruh pemerintah daerah harus dapat mempertahankan kualitas laporan keuangannya.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan dan mengevaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI pada Kabupaten Lampung Timur. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Lampung Timur yang terkonsentrasi di kantor BPKAD.

**B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan dan mengevaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI pada Kabupaten Lampung Timur. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Lampung Timur yang terkonsentrasi di kantor BPKAD..

**C. Analisis Data**

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data dilapangan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 246) mengemukakan bahwa: “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles and Huberman, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

*1. Data Reduction* (Reduksi Data)

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan”.

*2. Data Display* (Penyajian Data)

“Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut”.

*3. Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan juga teori”.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian merupakan sebuah proses penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif tentang analisis penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah di kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan analisis bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan PP No.71 tahun 2010. BPKAD Kabupaten Lampung Timur, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang merupakan salah satu tugas konstitusi yang harus dilaksanakan setiap tahun anggaran berakhir, sehingga dengan demikian berdasarkan posisi laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat diketahui kinerja pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun 70 anggaran. Adapun tujuannya antara lain adalah untuk menyajikan informasi kepada para pengguna dalam rangka pengambilan keputusan.

Komponen-komponen laporan keuangan daerah disajikan oleh setiap entitas, kecuali :

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Daerah;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 ditinjau kembali dan disesuaikan dengan regulasi tersebut. Adapun basis pengukuran yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 adalah berdasarkan program dan kegiatan yang diukur sesuai volume kegiatan yang dinilai dengan mata uang rupiah. Basis pengukuran dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa kriteria pengukuran pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun pengukuran didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengukuran transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa basis pengukuran yang diterapkan dalam pos-pos laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu menggunakan mata uang rupiah dalam setiap volume kegiatan yang dilaksanakan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baru memiliki Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.12 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum memiliki kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Namun

demikian, pada praktiknya proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, baik dalam hal basis akuntansi maupun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan seluruh kebijakan dan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi ada kendala dan hambatan dalam penerapannya, yaitu keterbatasan dan masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan jaringan komputerisasi berbasis akrual (*accrual basic*).

Penggunaan aplikasi komputerisasi tersebut menunjukkan adanya kemauan yang sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Segala sesuatunya yang menjadi kendala dan hambatan tentunya menjadi perhatian dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyajikan 7 (tujuh) komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (bagian yang tidak dipisahkan dari laporan keuangan ini). Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.
2. Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2020 pada praktiknya telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
3. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti dan menerapkan seluruh kebijakan dan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi ada kendala dan hambatan dalam penerapannya, yaitu : keterbatasan kemampuan dalam bidangnya dan masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.

Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.

## **Jurnal Manajemen Diversifikasi**

Vol. 2. No. 2 (2022)

- BPKP. (2002). *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dwi Widjayanti, Nicky. 2010. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007*.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*.
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Artikel. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.
- Febriyanto, F., & Gusma, R. S. (2021). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2(1), 25-30.
- Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, Pramono., Yanuar E. Restianto., Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Heriawati Simanihuruk, Melly. 2013. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan*.
- I Bagus Surya Negara. 2015. *Toward implementation of accrual basis in Indonesia government key success factors*.
- International Public Sector Accounting Board. 2011. *International Public Sector Accounting Standards*. London: International Public Sector Accounting Board.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta.
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akruwal Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing, Jakarta. KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada*

*Pemerintah Daerah, Jakarta.*

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang *pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Jakarta.*

Pemerintah RI, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara.*

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara.*

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.*

Pemerintah RI, 2012. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.*

Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Pemerintah RI, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah.*

Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Pemerintah RI, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 64/20103 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Pemerintah RI, 2012. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang *Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja*

Pemerintah RI, 2013. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.*

Simanjuntak, 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor Pemerintahan di Indonesia.* Makalah ini disampaikan dalam Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 9 Desember 2010.

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: alfabeta